

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2024 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

**Palembang, Januari 2025**

Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Selatan



Mirwansyah, SKM, MKM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650501 198503 1006

## **SISTEMATIKA LKjIP**

---

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I - Pendahuluan,**

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum tentang Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

### **Bab II - Rencana Strategis dan Rencana Kinerja,**

Menjelaskan muatan rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2024-2026 dan rencana kerja tahunan 2024.

### **Bab III - Akuntabilitas Kinerja,**

Menjelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran.

### **Bab IV -Penutup,**

Menjelaskan berisi kesimpulan tinjauan secara umum mengenai permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **DATA UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, pada Pasal 4 menyatakan Tugas Pokok Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan membantu Gubernur melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 adalah :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan pedesaan, penanganan kemiskinan perkotaan, penanganan kemiskinan desa-desa terpencil, desa tertinggal, bantaran sungai dan perbatasan antar provinsi / kabupaten;
- e. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sosial;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;

- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan kemiskinan;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

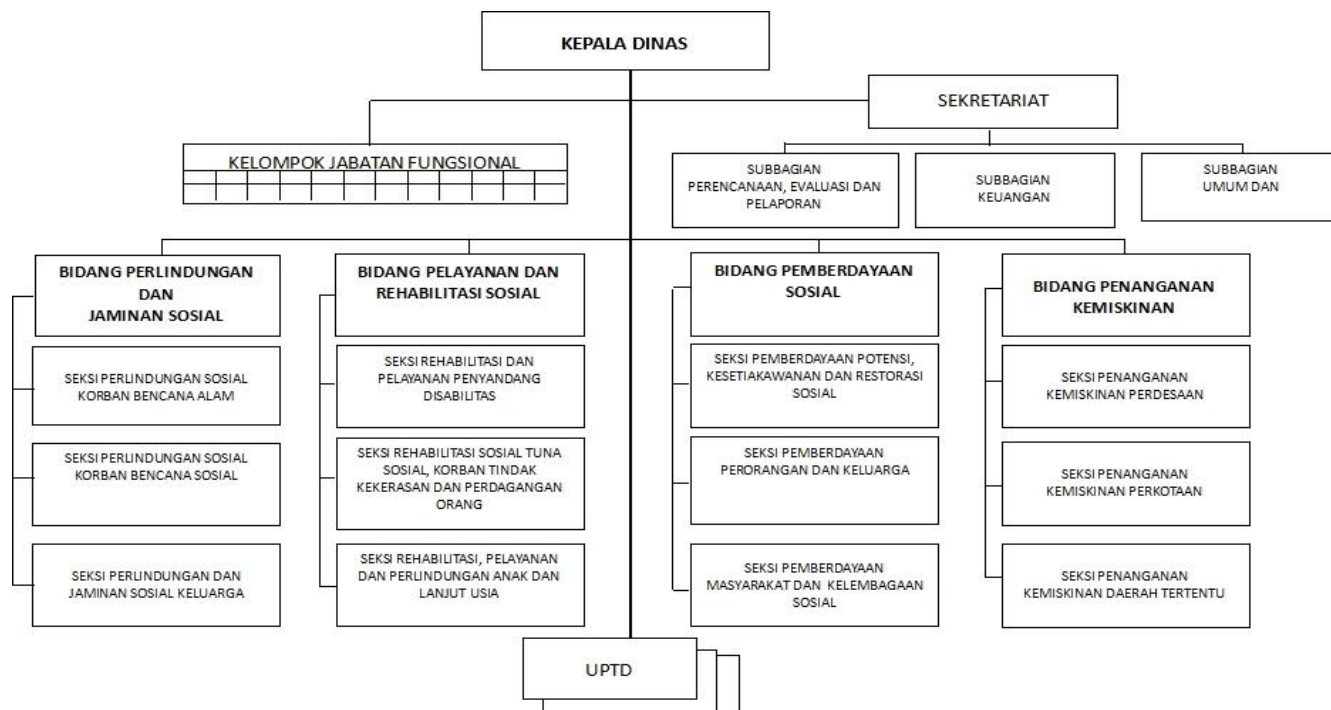
## **STRUKTUR ORGANISASI**

---

Untuk menunjang kinerja Dinas Sosial dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial, maka penataan susunan organisasi dengan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Provinsi Sumatera Selatan pada pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi;
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
    - 2. Sub Bagian Keuangan ;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi
    - 1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam;
    - 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Sosia;
    - 3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;
  - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi;
    - 1. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Penyandang Disabilitas;
    - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang;
    - 3. Seksi Rehabilitasi,Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia
  - e. Bidang Pemberdayaan Sosial; membawahi;
    - 1. Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
    - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial

- f. Bidang Penanganan Kemiskinan membawahi;
  1. Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan;
  2. Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan;
  3. Seksi Penanganan Kemiskinan Daerah Tertentu.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



## DATA UMUM JUMLAH PEGAWAI ASN DAN NON ASN

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| No     | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|--------|--------------------|--------|
| 1.     | S3                 | 1      |
| 2.     | S2                 | 25     |
| 3.     | S1                 | 79     |
| 4.     | D4                 | 3      |
| 5.     | D3                 | 3      |
| 6.     | SLTA               | 26     |
| Jumlah |                    | 137    |

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| No     | Jenis Kelamin | Jumlah |
|--------|---------------|--------|
| 1.     | Laki - laki   | 72     |
| 2.     | Perempuan     | 65     |
| Jumlah |               | 137    |

## Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

| No     | Jenis Golongan | Jumlah |
|--------|----------------|--------|
| 1.     | II/c           | 1      |
| 2.     | III/a          | 8      |
| 3.     | III/b          | 11     |
| 4.     | III/c          | 23     |
| 5.     | III/d          | 19     |
| 6.     | IV/a           | 13     |
| 7.     | IV/b           | 4      |
| 8.     | IV/c           | 3      |
| Jumlah |                | 82     |

## Sarana dan Prasarana

| No | Lokasi                        | Sarana dan Prasarana |         |             |
|----|-------------------------------|----------------------|---------|-------------|
|    |                               | Gedung               | Asrama  | Rumah Dinas |
| 1. | Dinas Sosial Provinsi         | 1 Unit               | -       | 3 Unit      |
| 2. | UPTD PSR Gepeng dan dan ODGJ  | 8 Unit               | 7 Unit  | 8 Unit      |
| 3. | UPTD PSR LU                   | 18 Unit              | 32 Unit | 11 Unit     |
| 4. | UPTD PSR AMPK                 | 14 Unit              | 6 Unit  | 5 Unit      |
| 5. | UPTD PSR Disabilitas Sensorik | 3 Unit               | 2 Unit  | 3 Unit      |
| 6. | UPTD PSRWTS                   | 6 Unit               | 7 Unit  | 1 Unit      |
| 7. | UPTD PSR ABH                  | 1 Unit               | 7 Unit  | 10 Unit     |

## Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pada Dinas Sosial dapat di bentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pembentukan, susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Gubernur. UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk uraian tugas dan fungsi UPTD yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 18 tahun 2018.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

Sebagai suatu instansi sektor publik, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan mempunyai rencana yang strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2024 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasarannya akan diuraikan dalam bab ini.

Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2024 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja ( *Performance Plan* ) Tahun 2024.

#### **A. PENDAHULUAN**

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Perencanaan stratejik membutuhkan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*oppurtunities*), dan tantangan / kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur–unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan Visi dan Misi serta strategi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan perkataan lain, rencana stratejik yang disusun Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan mengandung Visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya serta menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya.

Dengan visi, misi, dan strategis yang jelas dan tepat, maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan stratejik bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas

kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Perencanaan strategik ini setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan : (1) dimana Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan berada sekarang, (2) kemana arah tujuan, dan (3) bagaimana untuk menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategik mendefinisikan visi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, misi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi di dalam memenuhi visinya. Pertanyaan bagaimana kita menuju ke sana dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Dari uraian singkat di atas, unsur – unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategik serta strategi pencapaian tujuan / sasaran berupa program dan kegiatan.

## **B. RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat program– program pembangunan kesejahteraan sosial yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024–2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendekatan partisipatif.



Di samping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 3 (tiga) tahun mendatang, yakni meningkatnya citra aparat, masyarakat dan Provinsi Sumatera Selatan. Bagi manajemen Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, RENSTRA dipandang sebagai :

- Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan;
- Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
- Merupakan alat untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.

Sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan maka RENSTRA ini memuat: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan yang selanjutnya diuraikan di dalam program dan kegiatan. Sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2024 – 2026 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2024 – 2026 tersebut.

## **PERNYATAAN VISI DAN MISI**

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang tercantum pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yaitu :

### **“SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA”**

#### **1. Misi**

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Dari 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang ada maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan mendukung Misi ke-1 (satu) yaitu:

“Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun perdesaan”, yang mendukung sasaran “Maju Kesejahteraan Rakyat”.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

#### **2. Tujuan**

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan adalah :

“ Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

## **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan. Sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing – masing tujuan yang telah ditetapkan.

## 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis Gubernur Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan. Gubernur Sumatera Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan urusan sosial yaitu sebagai berikut:

| No | Kinerja Utama    | Indikator Kinerja                                               | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 1  | Angka Kemiskinan | Presentase penduduk sumsel yang hidup di bawah garis kemiskinan | Dinas Sosial     | BPS         |
| 2  | Ratio Gini       | Angka Ratio Gini di Prov. Sumatera Selatan                      | Dinas Sosial     | BPS         |

## 2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Secara umum tujuan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diwujudkan dengan indikator sebagai berikut:

| NO | SASARAN                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                        | SUMBER DATA  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 2                                                                                                            | 3                                                                                                                        | 7            |
| 1. | Meningkatnya Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial                                                      | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial                                                                           | Dinas Sosial |
| 2. | Meningkatnya Panti Sosial yang menyelenggarakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial                               | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                                 | Dinas Sosial |
| 3. | Meningkatnya Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PMKS | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Dinas Sosial |
| 4. | Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti         | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                             | Dinas Sosial |
| 5. | Meningkatnya Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti                           | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                               | Dinas Sosial |

| NO | SASARAN                                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                  | SUMBER DATA  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                  | 7            |
| 6. | Meningkatnya Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti                                                           | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                                  | Dinas Sosial |
| 7. | Meningkatnya Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti                                                        | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                               | Dinas Sosial |
| 8. | Meningkatnya Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | Dinas Sosial |

### C. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Rencana Kinerja (*Performance Plan*) untuk Tahun Anggaran 2024. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang dapat dicapai dalam Tahun 2024. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja 2024 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik – baiknya dan sebagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun ini. Pada tahun 2024 Target Kinerja yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET Tahun 2024 |
|----|-------------------|-------------------|
| 1  | Angka Kemiskinan  | 10.95             |
| 2  | Gini Ratio        | 0.324             |

## INDIKATOR KINERJA DAERAH

| NO | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                  | TARGET KINERJA (%) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 3                                                                                                                                  | 7                  |
| 1. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial                                                                                     | 56,60              |
| 2. | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                                           | 100,00             |
| 3. | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial           | 10                 |
| 4. | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                       | 100                |
| 5. | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                                         | 100                |
| 6. | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                                  | 100                |
| 7. | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                               | 100                |
| 8. | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | 100                |

### D. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Total Pagu Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 57.361.870.924.- (*Lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :

**Belanja Operasi** : **Rp. 57.126.430.924.-**  
 Belanja Pegawai : Rp. 16.080.290.030,- (28,14%)  
 Belanja Barang dan Jasa : Rp. 31.046.140.894,- (54,34%)  
 Belanja Bantuan Sosial : Rp. 10.000.000.000,- (17,50%)

**Belanja Modal** : **Rp. 235.440.000.-**  
 Belanja Modal Peralatan & Mesin : Rp. 175.440.000,- (74,51%)  
 Belanja Modal aset lainnya : Rp. 60.000.000,- (25,48%)

Belanja tersebut terdiri atas 7 Program dan 18 Kegiatan dan 69 sub kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b) Program Pemberdayaan Sosial
- c) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- d) Program Rehabilitasi Sosial
- e) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- f) Program Penanganan Bencana
- g) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Sedangkan total pagu Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN / Dekonsentrasi tidak lagi dialokasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Tahun 2024.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Sosial tahun 2024-2026. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum target indikator yang ditetapkan bisa dicapai pada tahun ini dan sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

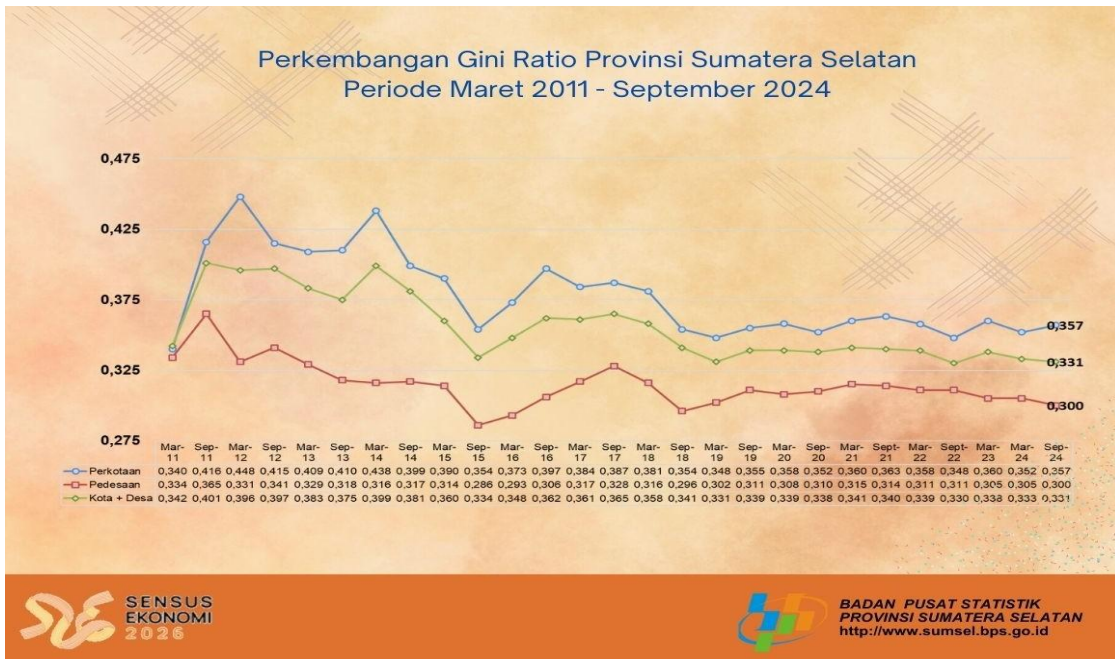
| <b>NO</b> | <b>Indikator Kinerja</b> | <b>Target Tahun 2024</b> | <b>Realisasi Tahun 2024</b> | <b>Capaian</b> |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1         | Angka Kemiskinan         | 10.95                    | 10.51                       | 100 %          |
| 2         | Gini Ratio               | 0.324                    | 0.331                       | 100 %          |

##### **3.1 Gini Ratio**

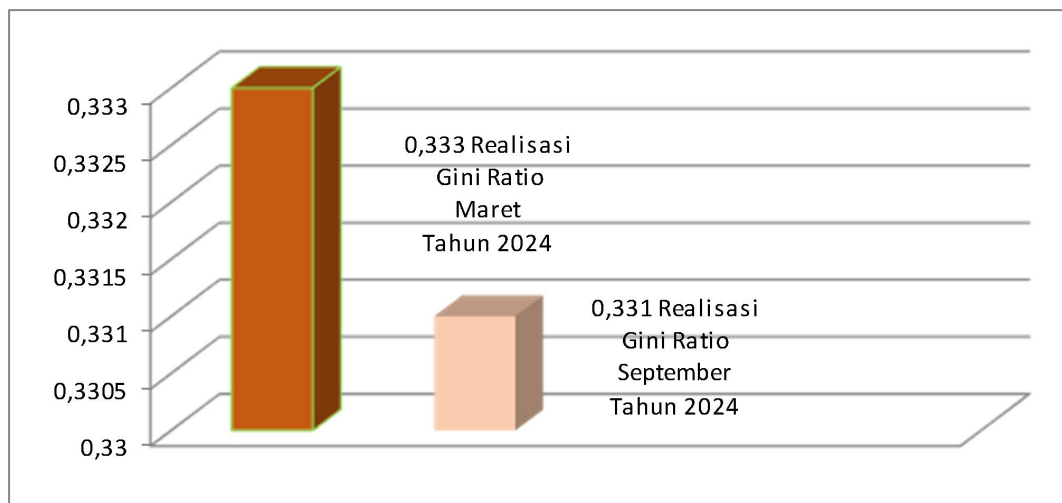
Gini Ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan dimana nilainya berkisar antara 0 dan 1. Ratio Gini = 0 mengindikasikan ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya, setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Sementara Rasio Gini = 1 menunjukkan terjadinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna, artinya pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Semakin mendekati 0 ketimpangan pendapatan semakin rendah dan semakin mendekati 1 ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan sejak Maret 2011 tampak fluktuatif dan cenderung menurun selama periode 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Maret 2011 Gini Ratio sebesar 0,342 pada September 2024 angka Gini Ratio

hanya sebesar 0,331. Ini menunjukkan selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sumatera Selatan.



Dalam enam bulan terakhir atau pada periode Maret 2024-September 2024 Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 0,333 keadaan Maret 2024 menjadi 0,331 pada September 2024. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 sebesar 0,357, naik 0,005 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,352. Sebaliknya untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada September 2024 tercatat sebesar 0,300 turun 0,005 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 sebesar 0,305.





Penurunan Gini ratio di Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada grafik diatas. Tercapainya target penurunan Ratio Gini di Provinsi Sumatera Selatan menandakan terjadinya perbaikan pemerataan pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penyebab dari menurunnya Gini ratio antara lain :

1. Perluasan jangkauan dan penambahan jumlah penerima bantuan sosial bagi masyarakat miskin/rentan. Pada tahun 2024 jumlah masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial sebanyak 2.444.966 jiwa yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota (dipedsaan maupun perkotaan), mengalami kenaikan sebesar 77,99% atau 537.942 jiwa jika dibandingkan capaian pada tahun 2023 sebanyak 1.907.024 jiwa. Dengan adanya perluasan jangkauan dan penambahan jumlah masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin/rentan tersebut. dan menguatkan perekonomian mereka.
2. Penambahan indeks bantuan sosial bagi penerima PKH dan Program Sembako

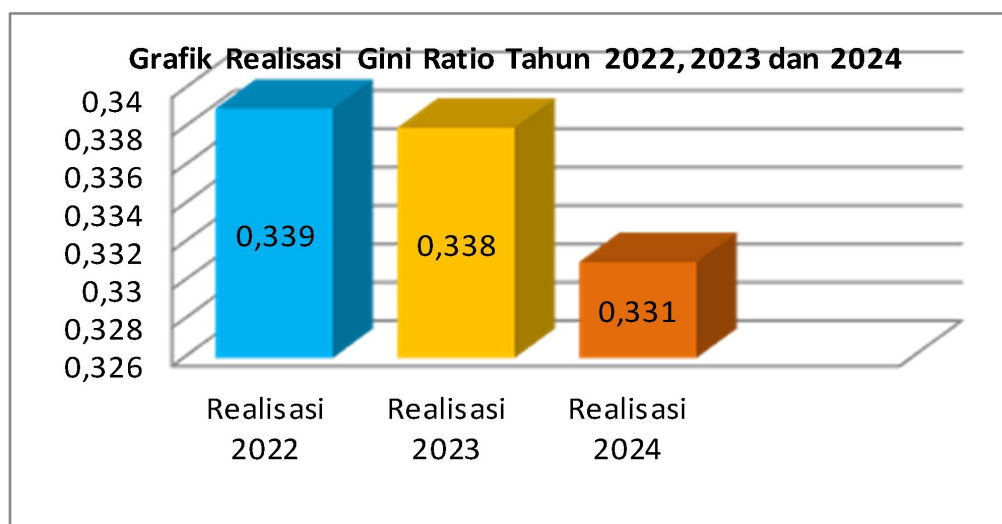
Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) khusus bagi Ibu Hamil dan Anak Balita mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 2.400.000/tahun, pada tahun 2020 mengalami penambahan indeks sebagai berikut:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| a. Ibu Hamil              | Rp. 3.000.000.- |
| b. Anak Balita            | Rp. 3.000.000.- |
| c. SD                     | Rp. 900.000.-   |
| d. SMP                    | Rp. 1.500.000.- |
| e. SMA                    | Rp. 2.000.000.- |
| f. Penyandang Disabilitas | Rp. 2.400.000.- |
| g. Lanjut Usia            | Rp. 2.400.000.- |

3. Penambahan indeks bantuan untuk program sembako yang semula sebesar Rp.110.000/KPM/bulan, maka pada Program Sembako indeks meningkat menjadi Rp.150.000/KPM/bulan. Bantuan sosial program sembako bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan bahan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya. Bantuan sosial

pangan ini diberikan dalam bentuk non tunai (cashless) melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan sehingga KPM dapat menggunakan untuk memperoleh bahan makanan pangan di e-Warong yang tersedia/ yang ditunjuk.

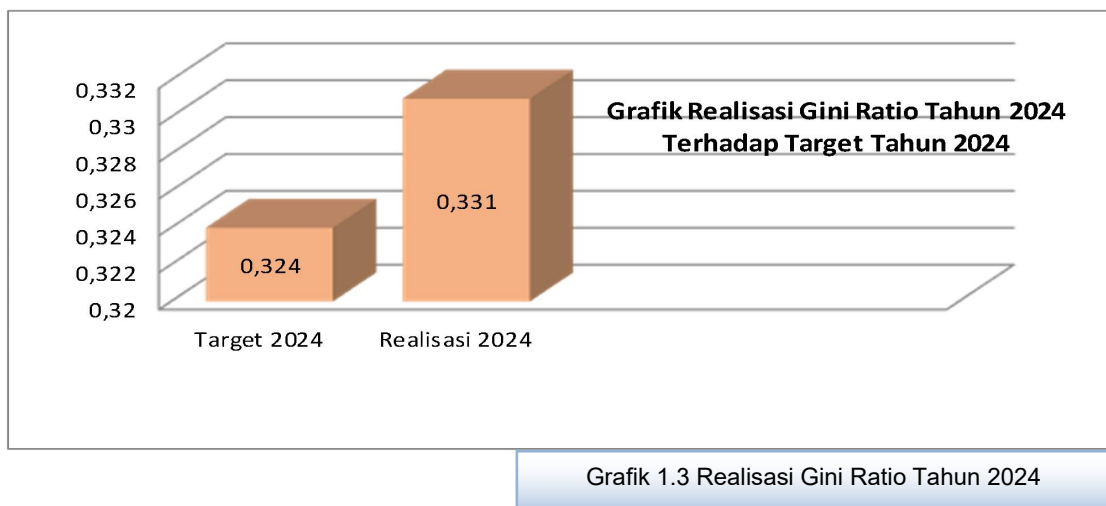
Penurunan Gini ratio di Provinsi Sumatera Selatan merupakan hasil dari berbagai intervensi kebijakan yang sudah digulirkan pemerintah tidak hanya menyentuh kalangan miskin dan rentan, tetapi juga kelas menengah. Beberapa program yang sudah diberikan antara lain perluasan penerima manfaat PKH dan bantuan sembako, dan lain-lain. Tak hanya itu, pemerintah juga sudah mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok UMKM agar tetap bertahan dari dampak pandemi. (Perbandingan target nasional).



Grafik 1.2 Perbandingan Realisasi Gini Ratio Tahun 2022 s.d 2024

Berdasarkan grafik diatas Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan pada kurun waktu dari tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi, dalam satu tahun terakhir atau pada periode Maret 2022-Maret 2023 Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami sedikit penurunan dari 0,339 keadaan Maret 2022 menjadi 0,338 keadaan Maret 2023 atau turun 0,001 poin, sedangkan kenaikan terjadi untuk periode September 2024 yaitu sebesar 0,008 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Provinsi Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat sebaiknya lebih ditingkatkan kembali.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 20,37 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 19,32 persen dan untuk daerah perdesaan 21,60 persen, yang juga berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.



Berdasarkan grafik diatas realisasi tahun 2024 Gini Ratio sebesar 0,331 melampaui capaian target tahun 2024 sebesar 0,324. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Gini Ratio Nasional (Pusat) pada bulan Maret 2024 sebesar 0,379. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,331 maka angka ini masih berada dibawah rata-rata nasional. Harapan kedepan Pemerintah Provinsi Sumatera selatan melalui Dinas Sosial dapat menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

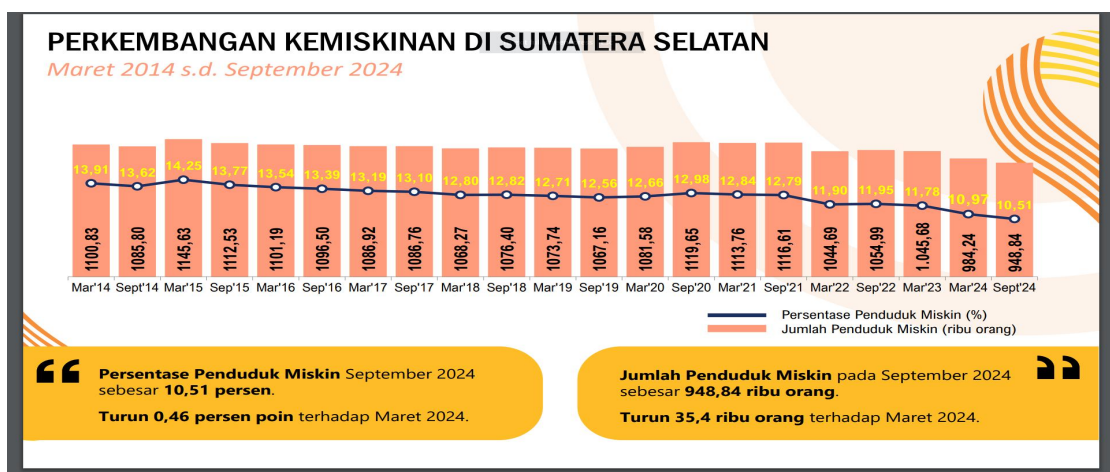
#### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Gini Ratio yaitu :**

Keberhasilan Pengurangan Gini Ratio merupakan kerja Bersama antara seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga hal tersebut tidak dapat di laksanakan sendiri oleh Dinas Sosial saja. Terlebih banyak sekali aspek yang mempengaruhi keberhasilan penanganan kemiskinan di suatu daerah. Oleh karena itu masih banyak hal yang harus diperbaiki agar kedepanya tujuan dari pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi 1 (satu) digit bisa tercapai dengan maksimal. Hal – hal yang perlu diperhatikan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Masih belum akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mengingat DTKS ini merupakan data rujukan yang digunakan dalam penyaluran bantuan pemerintah maka perlu dilakukan perbaikan data tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui verifikasi dan validasi data, agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.
2. Masih belum optimalnya Kolaborasi dan Koordinasi dengan semua *stakeholder* terkait. Mengingat Gini Ratio merupakan kerja Bersama dengan seluruh *stakeholder* terkait maka perlu dilaksanakan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intens dan efektif lagi agar semua komponen dapat fokus untuk mengerjakan tujuan yang sama agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.

### 3.2 Angka Kemiskinan

Secara umum kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, dalam periode Maret 2014 - September 2024, menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Selatan menurun dari 1.100,83 ribu orang di Maret 2014 menjadi 948,84 ribu orang pada September 2024. Penurunan persentase kemiskinan juga terjadi dari 13,91 persen menjadi 10,51 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2014 sampai dengan September 2024 disajikan pada Gambar 1.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan

Penduduk miskin September 2024 turun jika dibandingkan dengan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan September 2024 mencapai 948,84 ribu orang atau turun 35,4 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2024 yang berjumlah 984,24 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 10,51

persen, mengalami penurunan 0,46 persen poin terhadap persentase Maret 2024. Sedangkan untuk persentase penduduk miskin tingkat nasional pada September 2024 sebesar 8,57 persen, menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin terhadap Maret 2023, jumlah penduduk miskin nasional pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2024 dan menurun 1,84 juta orang terhadap Maret 2023.

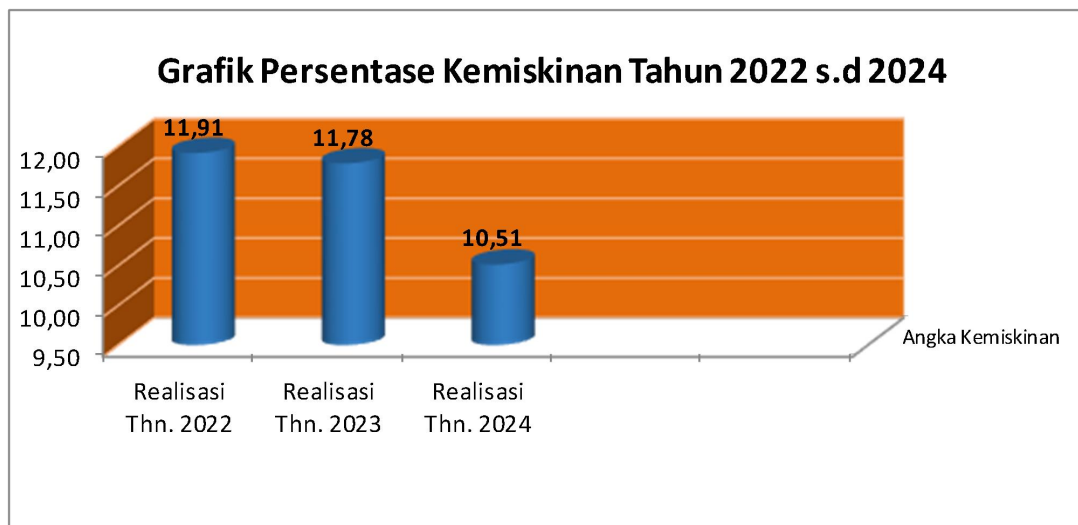


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode Maret 2024 - September 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebesar 32,3 ribu orang dari 342,34 ribu orang Maret 2024 menjadi 310,04 ribu orang September 2024. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 menurun sebesar 1,02 persen dari semula 10,04 persen pada Maret 2024 menjadi 9,02 persen pada September 2024. Penduduk miskin di perdesaan September 2024 menurun sebanyak 3,1 ribu orang dibandingkan Maret 2024 dari 641,90 ribu orang menjadi 638,81 ribu orang. Persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 menurun sebesar 0,10 persen poin dari semula 11,53 persen menjadi 11,43 persen pada September 2024.

Sedangkan untuk tingkat nasional Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 6,66 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 7,09 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 11,34 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 11,79 persen. Dibanding Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,59 juta orang (dari 11,64 juta orang pada Maret 2024 menjadi 11,05 juta orang pada September 2024). Sementara itu, pada

periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,57 juta orang (dari 13,58 juta orang pada Maret 2024 menjadi 13,01 juta orang pada September 2024).



Grafik 1.4 Perbandingan Persentase Kemiskinan Tahun 2022 s.d 2024

Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 sebagaimana yang tergambar pada grafik diatas, maka dapat dilihat angka kemiskinan terus mengalami penurunan, di tahun 2022 sebesar 11,91% sedangkan di tahun 2023 sebesar 11,78% mengalami penurunan capaian sebesar 0,13%. Sama halnya pada tahun 2024 persentase kemiskinan sebesar 10,51% kembali mengalami penurunan sebesar 12,74% bila dibandingkan persentase kemiskinan pada tahun 2023. Jika dilihat dari grafik capaian persentase angka kemiskinan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2024 - September 2024 antara lain adalah:

- Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Triwulan III 2024. Ekonomi Sumatera Selatan triwulan III-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen (y-on-y).
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 3,86 persen, menurun dibanding TPT Februari 2024 (3,97 persen).
- Inflasi September 2024 relatif terkendali sebesar 1,40 persen (y on y).
- Nilai Tukar Petani (NTP) September 2024 sebesar 124,44, naik 8,02 persen poin dibandingkan NTP Maret 2024.
- Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) September 2024 sebesar 125,40. Meningkat 6,23 persen poin dibanding Maret 2024.

- f. Berbagai program bansos dikucurkan antara lain PKH, BPNT/SEMPAKO dan PBI di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selain itu dikucurkan bantuan CSR beras dan mie di berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.
- g. Pada periode Maret 2024-September 2024 terjadi perubahan harga beberapa kebutuhan pokok seperti kenaikan harga beras, minyak goreng dan gula pasir. Selain itu terjadi penurunan beberapa harga kebutuhan pokok seperti penurunan harga daging ayam ras dan telur ayam ras.

Keberhasilan penurunan persentase angka kemiskinan merupakan kerja sama bersama antara seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Sosial tapi dari seluruh aspek stakeholder yang ada. Penurunan persentase angka kemiskinan ini salah satunya didukung melalui perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup. Dinas Sosial merupakan salah satu perangkat daerah yang ikut berperan dalam penurunan angka kemiskinan disamping instansi terkait lainnya. Adapun program kegiatan yang mendukung terjadinya penurunan persentase angka kemiskinan ini antara lain:

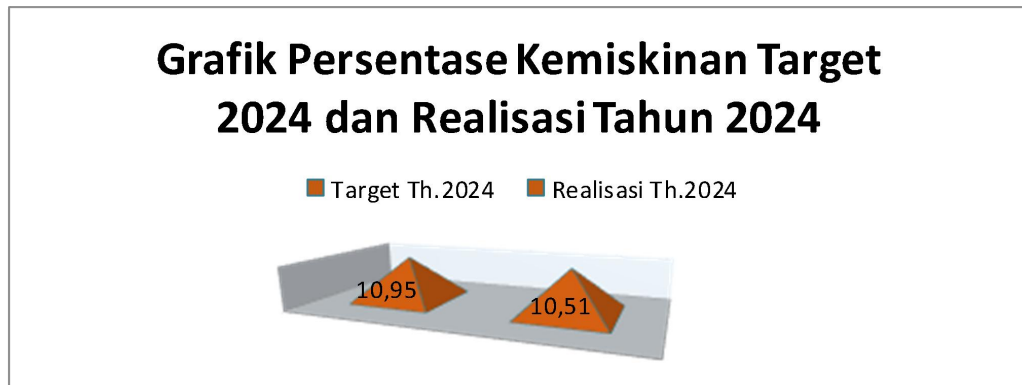
1. Program Nasional dari Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 293.940 Keluarga Miskin Penerima Manfaat (KPM). Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Tujuan dari program ini untuk :
  - Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat sangat miskin;
  - Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak Indonesia khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan);
  - Mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib pendidikan dasar 12 Tahun dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

Kriteria dari PKH ini adalah Rumah Tangga yang memiliki anak balita, anak usia sekolah Ibu hamil, penyandang disabilitas berat dan lanjut

- usia berusia 70 tahun keatas. Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan pada 17 Kabupaten/Kota yaitu Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin, Muba, OKI, OI, Lahat, Musi Rawas, Empat Lawang, Muara Enim, OKU, OKUS, OKUT, PALI dan Muratara.
2. Bantuan Program Sembako kepada warga miskin di Provinsi Sumatera Selatan di 17 Kabupaten/Kota. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdaftar sebesar Rp. 200.000/bulan sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat akan kebutuhan pangan yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan Sosial Pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya berupa beras dan telur.
  3. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Miskin di wilayah 9 Kabupaten/Kota sebanyak 1.360 KK. Bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan/bahan usaha kepada masyarakat yang sudah memiliki embrio usaha namun terhambat perkembangannya sehingga diharapkan dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
  4. Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, Melalui pelayanan sosial didalam panti, diluar panti dan bantuan sosial (Asistensi Lanjut Usia/Bantuan Langsung Tunai) bagi lansia non potensial serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi lansia potensial.
  5. Program Perlindungan Sosial Anak Pelayanan di dalam panti, diluar panti dan bantuan sosial bagi anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
  6. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), pemberian bantuan cash transfer bagi penyandang disabilitas berat dan bantuan alat bantu, penjangkauan kedaruratan/bebas pasung bagi penyandang disabilitas mental (orang dengan gangguan jiwa)
  7. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial



Pemberian bantuan logistik/bufferstock dan pelayanan psikososial bagi korban bencana alam maupun bencana sosial.



Grafik 1.5 Persentase Kemiskinan Target 2024 dan Realisasi Tahun 2024

Berdasarkan grafik Capaian Persentase Kemiskinan Tahun 2024 dapat dijelaskan, pada akhir tahun 2024 realisasi persentase angka kemiskinan sebesar 10,51% dari yang ditargetkan sebesar 10,95% hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 0,44% atau target penurunan angka kemiskinan tercapai.

Berikut ini beberapa program kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama terkait Penurunan Persentase Angka Kemiskinan :

- I. Program Pemberdayaan Sosial dengan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Provinsi.
- II. Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia terlantar di dalam panti.
  - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti.
  - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.
- III. Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.
  - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
  - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

- Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

IV. Program Penanganan Bencana dengan Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Permakanan dan Sandang.
- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi.
- Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan.
- Pelayanan Dukungan Psikososial.

V. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Kegiatan sebagai berikut :

- Pemeliharaan dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

## 2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Adapun realisasi dari indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut:

| NO       | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                  | TARGET KINERJA (%) | REALISASI (%) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>3</b>                                                                                                                           | <b>7</b>           |               |
| 1        | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial                                                                                     | 56,60              | 81,92         |
| 2        | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                                           | 100,00             | 100           |
| 3        | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial           | 10                 | 12,50         |
| 4        | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                       | 100                | 100           |
| 5        | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                                         | 100                | 100           |
| 6        | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                                  | 100                | 100           |
| 7        | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                               | 100                | 100           |
| 8        | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | 100                | 100           |

Dalam tahun 2024 capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sangat baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari 8 (Delapan) Indikator Kinerja diatas semuanya mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran dan indikator yang tersebut dapat dilihat melalui penjelasan sebagai berikut:

**1. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, target 56,60% dan realisasi 81,92 %.**

Terlampauinya target ini dikarenakan adanya ;

➤ Program Nasional dari Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 293.940 Keluarga Miskin Penerima Manfaat (KPM).

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin.

Tujuan dari program ini untuk :

- Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat sangat miskin;
- Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak Indonesia khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan);
- Mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib pendidikan dasar 12 Tahun dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

Kriteria dari PKH ini adalah Rumah Tangga yang memiliki anak balita, anak usia sekolah Ibu hamil, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia berusia 70 tahun keatas. Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan pada 17 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Peran pendamping PKH sangat penting dalam mendorong dan memotivasi KPM untuk lebih mandiri. Peran dan keterampilan

pendamping dalam memfasilitasi sangat menentukan progresivitas KPM PKH dampingannya. Para pendamping Program PKH dibekali berbagai keterampilan pendampingan yang akan meningkatkan kapasitas mereka dalam mendampingi KPM. Peningkatan kapasitas SDM pelaksana PKH dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan teknis (Bimtek), dan bimbingan pemantapan kebutuhan program. Kepekaan, keterampilan, dan semangat seorang pendamping sangat menentukan kegigihan usahanya mengantarkan graduasi KPM PKH dampingannya. Kedepannya lebih ditekankan untuk optimalisasi peran pendamping dalam rangka percepatan rasio graduasi KPM yang lebih tinggi.

- Program Sembako yang diberikan kepada 433.959 KPM, sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat akan pangan yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan di 17 Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan Sosial Pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Program Sembako merupakan upaya pemerintah untuk menransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai (cashless) melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan sehingga KPM dapat menggunakan untuk memperoleh bahan makanan pangan di e-Warong yang tersedia. Tujuan dari program Sembako adalah sebagai berikut;

- Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
- Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Sedangkan manfaat dari program Sembako adalah :

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT); dan
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Dengan adanya program Sembako, diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM dalam hal makanan, sehingga dapat membuat sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Selain itu, penambahan jenis bahan pangan yang diberikan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat, terutama untuk menekan angka stunting di Indonesia.

Penyaluran dana program Sembako dilakukan melalui mekanisme uang elektronik dengan alat pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli komoditas bahan pangan yang telah ditentukan untuk program Sembako di Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) dan tidak dapat diambil tunai. Bila komoditas yang dapat dibelanjakan sebelumnya beras dan atau telur, pada Program Sembako ditambahkan dengan komoditas bahan pangan yang mengandung karbohidrat (jagung, singkong, ubi, sagu serta umbi-umbian lainnya), protein hewani (daging ayam, daging, ikan), protein nabati (tahu, tempe dan kacang-kacangan) dan vitamin mineral (sayuran dan buah-buahan).

➤ **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial**

Pemberian bantuan logistik/bufferstock dan pelayanan psikososial bagi korban bencana alam maupun bencana sosial.

➤ **Bantuan beras bagi warga yang terdampak PPKM di Provinsi Sumatera Selatan, Bantuan ini merupakan Program Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin yang terdampak kebijakan PPKM di Provinsi Sumatera Selatan.**

Jumlah warga yang menerima bantuan sebanyak 100.000 KK, setiap KK mendapatkan bantuan sebesar 5 Kg beras.

**2. Meningkatnya pelayanan sosial di dalam panti, dengan indikator Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan target 100%, realisasi 100%.**

Terlampauinya target ini dikarenakan adanya dukungan Program sebagai berikut:

- Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap 50 orang anak nakal dan anak yang berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum Inderalaya" melalui bimbingan mental, sosial dan keterampilan kewirausahaan. Dari 50 anak yang dibina tersebut sudah menunjukkan perubahan sikap, mental sosial dan termotivasi untuk hidup mandiri. Adapun hasil dari bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagai berikut :
  - Montir motor sebanyak 29 orang, dari jumlah tersebut 15 orang telah bekerja dibengkel motor, 8 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 6 orang masih mencari peluang kerja.
  - Las Listrik sebanyak 21 orang, dari jumlah tersebut 12 orang telah bekerja dibengkel las, 6 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 3 orang masih mencari peluang kerja.
- Tahun 2024 UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial (PSRWTS) telah melaksanakan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna sosial melalui bimbingan mental, sosial dan keterampilan kewirausahaan meliputi keterampilan salon dan menjahit. Bimbingan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan, masing-masing angkatan sebanyak 25 orang, Siswi menerima materi selama 5 bulan per-angkatan. Klien yang dibina sudah menunjukkan perubahan sikap, mental sosial dan termotivasi untuk hidup mandiri. Dari 25 orang siswi tersebut;
  - 45 orang telah membuka usaha menjahit sendiri dirumah dengan peralatan yang berasal dari bantuan stimulan mesin jahit dari dari UPTD PSRWTS.

- 5 orang lainnya telah membuka usaha salon di daerahnya masing-masing dengan peralatan yang berasal dari bantuan stimulan UPTD PSRWTS.

**3. Meningkatnya dukungan PSKS terhadap penanganan PMKS dengan target 10,00% dan realisasi sebesar 12,50%.**

Tercapainya sasaran dan indikator ini didukung oleh berapa unsur PSKS yang aktif dalam pelayanan Kesejahteraan Sosial maupun PSKS yang mendapatkan peningkatan Kapasitas dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

- TKSK sebanyak 236 orang
- Penyuluh Sosial sebanyak 30 Orang
- LKS sebanyak 100 Orang dan
- PSM sebanyak 200 orang

**4. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti dengan indikator Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh kebutuhan dasarnya, target 100% dan realisasi 100%.**

➤ Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik memberikan pelayanan kepada 12 orang anak penyandang disabilitas di dalam panti berupa :

- pendidikan formal (SDLB-A, SMPLB-A, SMALB-A)
- bimbingan fisik (olahraga, pemeliharaan kesehatan)
- bimbingan mental (keagamaan/ rohani, budi pekerti dan pramuka)
- bimbingan sosial (resosialisasi)
- bimbingan Keterampilan (bermain musik, menyanyi, pijat urut, membuat sapu, membuat kemoceng)
- pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan rujukan ke rumah sakit pemerintah.

Tujuan dari layanan yang diberikan antara lain :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
2. Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dengan memberikan kesamaan kedudukan, hak,

kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Penyandang Disabilitas di Panti Sosial ini diharapkan mampu melaksanakan fungsi sosialnya, dapat mengembangkan potensi secara optimal, menjadi pribadi mandiri, percaya diri dan produktif.

**5. Meningkatnya Kemandirian Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti dengan indikator Persentase Anak Terlantar yang memperoleh kebutuhan dasarnya, target 100% dan realisasi 100%.**

- Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap 50 orang anak nakal dan anak yang berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum Inderalaya" melalui bimbingan mental, sosial dan keterampilan kewirausahaan. Dari 50 anak yang dibina tersebut sudah menunjukkan perubahan sikap, mental sosial dan termotivasi untuk hidup mandiri.

Adapun hasil dari bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagai berikut :

- Montir motor sebanyak 29 orang, dari jumlah tersebut 15 orang telah bekerja dibengkel motor, 8 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 6 orang masih mencari peluang kerja.
- Las Listrik sebanyak 21 orang, dari jumlah tersebut 12 orang telah bekerja dibengkel las, 6 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 3 orang masih mencari peluang kerja.

**6. Meningkatnya Kemandirian Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti dengan indikator Persentase Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh kebutuhan dasarnya, target 100% dan realisasi 100%.**

Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar dalam UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita melalui pelayanan , bimbingan mental sosial kepada 200 orang Lanjut Usia (Jompo) terlantar yang terbagi pada Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Inderalaya (80 orang), Panti sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang (60 orang),



Lanjut Usia Harapan Kita Lubuk linggau (35 orang), Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Musi Rawas (25 orang ).

Bimbingan sosial ini dilaksanakan dalam bentuk 2 kegiatan, yang pertama dilaksanakan dalam ruangan pembinaan melalui jadwal yang ada, sedangkan yang kedua dilaksanakan di wisma-wisma yang ada. Pembinaan ini merupakan media yang sangat efektif bagi petugas panti untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul baik secara individu maupun kelompok. Penyaluran bakat keterampilan (kegiatan ini bertujuan untuk mengisi waktu luang dengan melakukan hal-hak yang bermanfaat seperti membuat kerajinan sapu bulu ayam, keset kaki dan merangkai bunga).

**7. Meningkatnya Kemandirian Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti dengan indikator Persentase Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh kebutuhan dasarnya, target 100% dan realisasi 100%.**

- Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada 180 orang gelandangan pengemis dan orang terlantar dengan psikotik (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berupa bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut. Tujuan dari layanan di panti sosial PR-PGOT ini antara lain:
  - Terpenuhinya kebutuhan dasar klien panti.  
Membantu klien panti mencapai kualitas hidup yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
  - Gelandangan, pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa tidak berkeliaran di jalanan sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

**8. Meningkatnya Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi dengan indikator Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi, target 100% dan realisasi 100%.**

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial

Pemberian bantuan logistik/bufferstock dan pelayanan psikososial bagi korban bencana alam maupun bencana sosial.

- Bantuan beras bagi warga yang terdampak PPKM di Provinsi Sumatera Selatan, Bantuan ini merupakan Program Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin yang terdampak kebijakan PPKM di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah warga yang menerima bantuan sebanyak 100.000 KK, setiap KK mendapatkan bantuan sebesar 5 Kg beras.

## B. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023 dan 2024

| NO | Sasaran Strategis                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                        | Realisasi |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|    |                                                                                                              |                                                                                                                          | 2023      | 2024    |
| 1  | Meningkatnya Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial                                                      | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial                                                                           | 62,57 %   | 81,92 % |
| 2  | Meningkatnya Panti Sosial yang menyelenggarakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial                               | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                                 | 100%      | 100%    |
| 3  | Meningkatnya Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PMKS | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 10,00 %   | 12,50 % |
| 4  | Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti         | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                             | 100%      | 100%    |
| 5  | Meningkatnya Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti                           | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                               | 100%      | 100%    |

|   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |      |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 6 | Meningkatnya Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti                                                           | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                                  | 100% | 100% |
| 7 | Meningkatnya Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti                                                        | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                               | 100% | 100% |
| 8 | Meningkatnya Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | 100% | 100% |

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat bahwa dalam dua tahun terakhir capaian indikator Dinas Sosial telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar 62,57%, walaupun mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 81,90% tetapi hal tersebut sudah melebihi dari target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 54%. Peningkatan capaian kinerja ini disebabkan meningkatnya jangkauan pelayanan dan perluasan akses pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui program kegiatan yang dilaksanakan. Adanya peningkatan capaian ini salah satunya didukung melalui perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup.
- Sedangkan untuk indikator yang termasuk kedalam SPM Bidang Sosial capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dan ditahun 2024 capaiannya juga 100%.

### **C. Capaian Penghargaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024**

Pada Tahun 2024 Dinas Sosial memperoleh beberapa penghargaan yang meliputi :

1. Penghargaan yang diterima dari BPJS Kesehatan dalam hal Kontribusi yang sudah dilaksanakan selama ini bagi negeri demi terselenggaranya Program Jaminan Kesehatan bagi Rakyat Indonesia.



## B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah Pagu Anggaran untuk menunjang kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dari Dana APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 57.361.870.924,-** (*Lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*) terdiri dari :

### 1. DANA APBD Tahun 2024

Jumlah dana APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 57.361.870.924,- dengan realisasi per-desember 2024 sebesar Rp. 55.382.127.413,- (96,55%) yang terdiri dari :

- ✓ Belanja Operasi sebesar Rp. 57.126.430.924.- (*lima puluh tujuh milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 55.142.750.541,- atau sebesar (96,53%).
- ✓ Belanja Modal Rp. 235.440.000,- (*dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 234.100.000,- atau sebesar (99,43%)

Adapun uraian kegiatan selama tahun 2024 di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, meliputi :

| URAIAN                                                                |                                                                  | ANGGARAN<br>(Rp)      | REALISASI<br>/Des.2024(Rp) | %             | SISA<br>ANGGARAN |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>          |                                                                  | <b>20.190.120.530</b> | <b>18.437.497.770</b>      | <b>91,32%</b> |                  |
|                                                                       | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 323.800.000           | 296.559.769                | 91,59%        |                  |
|                                                                       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 17.635.080.530        | 16.176.684.761             | 91,74%        |                  |
|                                                                       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 85.000.000            | 34.000.000                 | 40,00%        |                  |
|                                                                       | Administrasi Umum Perangkat daerah                               | 997.500.000           | 831.158.564                | 83,32%        |                  |
|                                                                       | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 874.000.000           | 863.740.246                | 98,83%        |                  |
|                                                                       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah     | 150.300.000           | 110.004.430                | 73,19%        |                  |
|                                                                       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah        | 124.440.000           | 123.350.000                | 99,12%        |                  |
| <b>Program Pemberdayaan Sosial</b>                                    |                                                                  | <b>450.000.000</b>    | <b>431.281.950</b>         | <b>95,84%</b> |                  |
|                                                                       | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi        | 450.000.000           | 431.281.950                | 95,84%        |                  |
| <b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b> |                                                                  | <b>33.000.000</b>     | <b>31.470.100</b>          | <b>95,36%</b> |                  |
|                                                                       | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran                        | 33.000.000            | 31.470.100                 | 95,36%        |                  |

|                                                 |                                                                                                                           |                       |                        |               |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--|
|                                                 | Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal           |                       |                        |               |  |
| <b>Program Rehabilitasi Sosial</b>              |                                                                                                                           | <b>8.076.689.450</b>  | <b>8.012.334.252</b>   | <b>99,20%</b> |  |
|                                                 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                                                 | 553.580.000           | 552.530.073            | 99,81%        |  |
|                                                 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                                                   | 1.418.515.350         | 1.417.654.650          | 99,94%        |  |
|                                                 |                                                                                                                           |                       |                        |               |  |
|                                                 | Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti                                                                  | 2.465.563.000         | 2.460.735.000          | 99,80%        |  |
|                                                 | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                                         | 2.044.343.000         | 2.043.411.450          | 99,95%        |  |
|                                                 | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 1.594.688.100         | 1.538.003.079          | 96,45%        |  |
| <b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>  |                                                                                                                           | <b>27.631.560.944</b> | <b>27.528.497..581</b> | <b>99,63%</b> |  |
|                                                 | Pengangkatan Anak antar WNI                                                                                               | 21.000.000            | 5.820.000              | 27,71%        |  |
|                                                 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                | 27.610.560.944        | 27.522.677.581         | 99,68%        |  |
| <b>Program Penanganan Bencana</b>               |                                                                                                                           | <b>872.500.000</b>    | <b>853.470.860</b>     | <b>97,82%</b> |  |
|                                                 | Penyediaan Permakanan                                                                                                     | 150.000.000           | 149.850.000            | 99,90%        |  |
|                                                 | Penyediaan Sandang                                                                                                        | 30.000.000            | 29.950.000             | 99,83%        |  |
|                                                 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                                                   | 30.000.000            | 29.950.000             | 99,83%        |  |
|                                                 | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan                                                                                    | 646.400.000           | 635.525.360            | 98,32%        |  |
|                                                 | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                                                            | 16.100.000            | 8.195.500              | 50,90%        |  |
| <b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b> |                                                                                                                           | <b>108.000.000</b>    | <b>87.575.000</b>      | <b>81,09%</b> |  |
|                                                 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                                                       | 66.000.000            | 46.175.000             | 69,96%        |  |
|                                                 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                                                         | 42.000.000            | 41.400.000             | 98,57%        |  |

***Hasil dan manfaatnya yang di peroleh, antara lain :***

- Tersalurkannya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi warga miskin di 17 Kabupaten/Kota sebanyak 1.360 KPM. Adapun jenis usaha yang diberikan bantuan antara lain : bengkel motor, steam motor, counter pulsa, warung sembako, usaha kerupuk/kemplang, jual pempek/tekwan, jual gorengan, usaha sarapan pagi, usaha tenun songket, menjahit dan lain-lain
- Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar dalam UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita melalui pelayanan, bimbingan mental sosial kepada 200 orang Lanjut Usia (Jompo) terlantar yang terbagi pada Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Inderalaya (80 orang), Panti sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang (60 orang), Lanjut Usia Harapan Kita Lubuk linggau (35 orang), Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Musi Rawas (25 orang).

Bimbingan sosial ( kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk 2 kegiatan, yang pertama dilaksanakan dalam ruangan pembinaan melalui jadwal yang ada, sedangkan yang kedua dilaksanakan di wisma-wisma yang ada. Pembinaan ini merupakan media yang sangat efektif bagi petugas panti untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul baik secara individu maupun kelompok.

Penyaluran bakat keterampilan (kegiatan ini bertujuan untuk mengisi waktu luang dengan melakukan hal-hak yang bermanfaat seperti membuat kerajinan sapu bulu ayam, keset kaki dan merangkai bunga.

- Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada 180 orang gelandangan pengemis dan orang terlantar dengan psikotik (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berupa bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut. Tujuan dari layanan di panti sosial PR-PGOT ini antara lain:
  - Terpenuhinya kebutuhan dasar klien panti.  
Membantu klien panti mencapai kualitas hidup yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
  - Gelandangan, pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa tidak berkeliaran di jalanan sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

- Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik memberikan pelayanan kepada 12 orang anak penyandang disabilitas di dalam panti berupa :
  - pendidikan formal (SDLB-A, SMPLB-A, SMALB-A)
  - bimbingan fisik (olahraga, pemeliharaan kesehatan)
  - bimbingan mental (keagamaan/ rohani, budi pekerti dan pramuka)
  - bimbingan sosial (resosialisasi)
  - bimbingan Keterampilan (bermain musik, menyanyi, pijat urut, membuat sapu, membuat kemoceng)
  - pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan rujukan ke rumah sakit pemerintah.

Tujuan dari layanan yang diberikan antara lain :

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
  - b. Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dengan memberikan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Penyandang Disabilitas di Panti Sosial ini diharapkan mampu melaksanakan fungsi sosialnya, dapat mengembangkan potensi secara optimal, menjadi pribadi mandiri, percaya diri dan produktif.
- Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap 50 orang anak nakal dan anak yang berhadapan dengan Hukum di UPTD Panti Sosial rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum "Inderalaya" melalui bimbingan mental, sosial dan keterampilan kewirausahaan. Dari 50 anak yang dibina tersebut sudah menunjukkan perubahan sikap, mental sosial dan termotivasi untuk hidup mandiri. Adapun hasil dari bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagai berikut :
    - Montir motor sebanyak 29 orang, dari jumlah tersebut 15 orang telah bekerja dibengkel motor, 8 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 6 orang masih mencari peluang kerja.



- Las Listrik sebanyak 21 orang, dari jumlah tersebut 12 orang telah bekerja dibengkel las, 6 orang melanjutkan sekolah formal sedangkan 3 orang masih mencari peluang kerja.
- Tahun 2024 UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial (PSRWTS) telah melaksanakan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna sosial melalui bimbingan mental, sosial dan keterampilan kewirausahaan meliputi keterampilan salon dan menjahit. Bimbingan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan, masing-masing angkatan sebanyak 25 orang. Pada angkatan 1 (pertama) siswi hanya menerima materi selama 2 bulan dikarenakan pada saat itu masa puncaknya pandemi covid-19 sehingga mereka akhirnya dipulangkan kerumah masing-masing.  
 Pada angkatan ke-2 (dua) siswi full menerima materi keterampilan selama 5 bulan, dimana sebelumnya diadakan rapid test terlebih dahulu. Klien yang dibina sudah menunjukkan perubahan sikap, mental sosial dan termotivasi untuk hidup mandiri. Dari 25 orang siswi tersebut
  - 20 orang telah membuka usaha menjahit sendiri dirumah dengan peralatan yang berasal dari bantuan stimulan mesin jahit dari dari UPTD PSRWTS.
  - 5 orang lainnya telah membuka usaha salon didaerahnya masing-masing dengan peralatan yang berasal dari dari bantuan stimulan UPTD PSRWTS.
- Terbinanya anak terlantar sebanyak 130 orang terdiri atas : 30 orang di panti anak amal bhakti sekayu MUBA, 30 org di panti anak budi mulya lubuk linggau MURA, 20 orang di Panti anak tunas harapan kayu agung OKI dan 50 orang anak remaja putus sekolah di Panti sosial bina remaja Indralaya di Indralaya Ogan Ilir.
  - Anak- anak yang berada di 3 panti anak dengan usia mereka yang bervariasi mereka dapat mengenyam pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan menengah atas (SLTA)
  - Sedangkan anak remaja putus sekolah di Panti Sosial bina remaja Indralaya mereka diberikan bimbingan mental sosial dan bimbingan keterampilan menjahit, salon dan montir motor dengan hasil sebagai berikut:

- Jumlah peserta keterampilan montir motor sebanyak 16 orang, dari jumlah tersebut 10 orang membuka usaha sendiri dan 6 orang bekerja dibengkel.
  - Keterampilan menjahit berjumlah 18 orang, dari jumlah tersebut : 5 orang telah bekerja pada usaha konveksi dan 13 orang membuka usaha sendiri.
  - Keterampilan Salon 16 orang dari jumlah tersebut 9 orang telah bekerja disalon-salon, sedangkan 6 orang membuka usaha sendiri, melanjutkan pendidikan sebanyak 1 orang.
- Pengasramaan dan penyediaan kebutuhan dasar (permakanan) penyediaan peralatan kebersihan/bahan pembersih, penyediaan tenaga pengasuh dan keamanan di 3 panti anak, penyediaan tenaga pengasuh dan keamanan di panti anak, penyediaan tenaga bimbingan spiritual, penyediaan tenaga narasumber/ tenaga instruktur.
- Bantuan Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2024
- Bantuan pengembangan usaha ini diberikan sebanyak 15 Paket di 3 (tiga) Kabupaten/Kota diantaranya Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuk linggau dengan 10 Jenis Usaha dengan rincian Paket antara lain Usaha Jualan Sembako sebanyak 4 Paket , Usaha Pangkas Rambut sebanyak 1 Paket , Usaha Jual Sosis dan Gorengan sebanyak 2 Paket , Usaha Konter Pulsa sebanyak 2 Paket, Usaha Kerupuk/Kemplang sebanyak 1 Paket , Kerajinan Anyaman dan Jualan Siomay sebanyak 1 Paket, Usaha Menjahit sebanyak 1 Paket, Usaha Jualan Ikan Giling sebanyak 1 Paket, Usaha Servis Elektronik sebanyak 1 Paket, Usaha Jualan Sayur Masak sebanyak 1 Paket.
  - Bantuan alat bantu untuk tahun 2024 sebanyak 31 Orang penyandang disabilitas yang bantuan diberikan berupa kursi roda sebanyak 15 Buah, alat bantu dengar sebanyak 14 Buah dan prothese kaki sebanyak 2 Unit yang tersebar di 4 (empat) kabupaten/kota diantaranya Prabumulih, Empat Lawang, Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
  - Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia dalam rangka Kampanye Sosial Lanjut Usia di Kota Palembang sebanyak

50 paket di Kota Palembang. Bantuan yang diberikan Kain, Selimut, Handuk, Susu dan Beras 5 Kg.

- Bantuan Penyediaan Alat Bantu bagi Lanjut Usia dalam rangka Kampanye Sosial Lanjut Usia sebanyak 27 buah di Kota Palembang. Bantuan yang diberikan berupa 10 buah Kursi Roda dan 10 buah Tongkat Kaki 3.
- Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak dalam rangka Perlindungan Sosial Respon Kasus Anak sebanyak 50 paket di Kab/Kota (Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam). Bantuan yang diberikan berupa Tas, Pakaian, Susu, Beras 5 Kg.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN

Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024-2026 lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meningkatkan kemandirian keluarga miskin, meningkatkan kualitas bantuan sosial kepada korban bencana serta peningkatan sarana dan prasarana panti sosial dan meningkatkan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Selama tahun 2024 pelaksanaan tugas pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan dengan cukup baik dan dapat mencapai seluruh target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka bertujuan menurunkan persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, agar bisa tercapai secara maksimal terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan antara lain :

- Belum optimalnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mengingat DTKS ini merupakan data rujukan yang digunakan dalam penyaluran bantuan pemerintah maka perlu dilakukan perbaikan data tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan, agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.
- Kurangnya Kolaborasi dan Koordinasi dengan semua *stakeholder* terkait. Mengingat kemiskinan merupakan kerja Bersama dengan seluruh *stakeholder* terkait maka perlu dilaksanakan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intens lagi agar semua komponen dapat fokus untuk mengerjakan tujuan yang sama dan hasil yang dihasilkan pun lebih maksimal.

Agar target indikator kinerja tersebut mampu tercapai lebih optimal, Dinas Sosial berupaya melakukan peningkatan dalam beberapa hal untuk mengatasi kendala tersebut yaitu :

1. Optimalisasi sinergitas program kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan kemiskinan.
2. Peningkatan kualitas data melalui perbaikan secara bertahap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) khususnya bagi keluarga miskin dan rentan dengan melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala.
3. Peningkatan partisipasi dunia usaha baik swasta, BUMN, BUMD dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Selain itu kedepannya perlu adanya peningkatan dalam beberapa hal, Baik itu berupa peningkatan kapasitas SDM bidang sosial, anggaran bidang sosial maupun koordinasi antar instansi yang terkait karena penyelesaian masalah sosial khususnya penurunan angka kemiskinan ini tidak bisa dikerjakan oleh Dinas Sosial sendiri.